

Model Ekonomi Islam Berbasis Keadilan Distributif: Tinjauan Teoritis dan Aplikatif

Ai Reni Ratnasari
STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

Submitted: 17-06-2024

Accepted: 11-08-2024

Published: 29-08-2024

Abstract

This article aims to analyze the Islamic economic model based on distributive justice which is a basic principle in achieving social and economic welfare. Distributive justice in Islamic economics prioritizes the fair distribution of wealth in accordance with individual rights and contributions, and seeks to avoid oppression of certain groups. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis, based on literature review from various international sources related to Islamic economics and distributive justice. The results of the study show that the concept of distributive justice in Islamic economics is not only related to the equal distribution of wealth, but also to the equal distribution of the rights and obligations of each individual in society. In addition, the application of instruments such as zakat, waqf, and profit-sharing systems in Islamic economics shows great potential to reduce economic and social inequality. The implication of this study is the importance of applying the principle of distributive justice in public economic policies to create more equitable social welfare, despite the great challenges in adapting it to the capitalistic global economic system.

Keywords: Islamic economy, justice, distributive

***Corresponding author**

aireni@albadar.ac.id

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Keadilan distributif merupakan konsep sentral dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pembagian kekayaan yang adil di masyarakat. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada pemerataan hasil produksi, tetapi juga memperhitungkan faktor moral dan etika yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil mengarah pada upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban individu dalam masyarakat (Rahim, 2015). Keadilan distributif bertujuan menghindari ketimpangan sosial yang terjadi akibat konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan memastikan setiap individu mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar-dasar teoritis serta aplikasi praktis model ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip keadilan distributif.

Salah satu kontribusi baru (novelty) dari penelitian ini adalah upaya untuk mengkaji implementasi prinsip keadilan distributif dalam konteks global yang modern. Model ekonomi Islam seringkali tertinggal dibandingkan dengan teori ekonomi konvensional dalam hal penerapan di negara-negara dengan sistem kapitalistik. Keadilan distributif dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi yang berfokus pada profit tanpa memperhitungkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Pane et al., 2024). Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam adalah zakat, waqf, dan sistem bagi hasil yang dikenal dengan istilah *muḍārabah* dan *musyārahah*, yang mendistribusikan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat berdasarkan kontribusinya (Jatmiko, 2024).

Namun, penerapan prinsip keadilan distributif ini menghadapi banyak tantangan di dunia modern. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan sosial dengan sistem ekonomi global yang cenderung berbasis pada kapitalisme dan individualisme (Furqani, 2019). Dalam konteks ini, penerapan zakat, waqf, dan prinsip bagi hasil dalam dunia modern membutuhkan penyesuaian agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan (Syamsurijal, 2024). Selain itu, terdapat tantangan dalam hal keterlibatan negara dan masyarakat dalam mengelola instrumen-instrumen tersebut secara efisien agar tujuan keadilan distributif dapat tercapai.

Penelitian ini juga mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara teori keadilan distributif dalam Islam dan praktiknya di dunia nyata. Meskipun banyak tulisan yang membahas teori ini, masih sedikit penelitian yang secara komprehensif mengaitkan teori tersebut dengan solusi praktis yang dapat diterapkan di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara Muslim yang sedang berjuang untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi (Alizadeh Emamzadeh, 2020). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana ekonomi Islam dapat memberikan solusi terhadap masalah ketimpangan sosial melalui penerapan model keadilan distributif yang lebih aplikatif dan realistis di zaman modern.

Dengan mengacu pada kerangka kerja teoretis yang ada dan menerapkannya dalam konteks kebijakan publik dan keuangan Islam, penelitian ini mengharapkan dapat menyajikan pandangan baru mengenai bagaimana model ekonomi Islam berbasis keadilan distributif dapat diadaptasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Mulyany & Furqani, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memformulasikan strategi-strategi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berbasis pada keadilan distributif dalam konteks ekonomi global saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menginterpretasi fenomena terkait keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh, khususnya mengenai penerapan teori keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang melibatkan nilai-nilai moral dan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perspektif individu atau kelompok dalam konteks sosial dan budaya

tertentu, yang dalam hal ini adalah penerapan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi. Penelitian ini juga akan berfokus pada pemahaman konsep-konsep dasar, teori-teori ekonomi Islam, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di masyarakat modern.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan. Data sekunder tersebut mencakup buku, artikel jurnal, serta laporan penelitian yang membahas tentang ekonomi Islam dan keadilan distributif. Menggunakan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang sudah ada dan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai topik yang dibahas. Sumber-sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal internasional yang berfokus pada topik keadilan distributif dalam ekonomi Islam, serta buku-buku yang mengulas prinsip-prinsip ekonomi Islam dan distribusi kekayaan dalam Islam (Rahim, 2015; Furqani, 2019). Data sekunder ini juga diperoleh dari berbagai artikel yang memuat hasil penelitian terkait penerapan ekonomi Islam dalam dunia nyata dan kebijakan ekonomi di negara-negara Muslim.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) yang mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran artikel-artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang membahas konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Kajian pustaka ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan menyusun teori-teori dasar terkait dengan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, serta untuk memahami tantangan praktis dalam mengimplementasikannya. Menurut Hartono (2015), kajian pustaka adalah langkah awal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang teori-teori yang relevan dan mengembangkan kerangka konsep yang diperlukan dalam analisis.

Data yang dikumpulkan melalui kajian pustaka akan dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan konsep-konsep utama yang muncul dalam sumber-sumber literatur mengenai ekonomi Islam dan keadilan distributif. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengkategorikan berbagai ide dan konsep yang relevan dengan teori dan aplikasi ekonomi Islam yang berbasis keadilan distributif. Teknik analisis isi juga membantu dalam mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan kesenjangan antara teori yang ada dengan penerapannya di dunia nyata (Bengtsson, 2016). Proses ini akan menghasilkan temuan yang menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan distributif diterapkan dalam kebijakan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan model ekonomi Islam di berbagai negara Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan hak individu dan masyarakat secara menyeluruh. Sebagai bagian dari prinsip keadilan yang lebih besar dalam Islam, keadilan distributif menekankan pada pembagian kekayaan dan sumber daya yang adil di antara anggota masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar atau hak setiap individu. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa distribusi kekayaan

haruslah sesuai dengan kontribusi dan peran individu dalam masyarakat, serta mempertimbangkan keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan sosial (Rahim, 2015).

Prinsip dasar dari keadilan distributif dalam ekonomi Islam adalah bahwa setiap individu harus menerima bagian dari hasil produksi sesuai dengan kontribusinya dan peranannya dalam masyarakat. Pembagian ini tidak hanya mempertimbangkan kontribusi ekonomi semata, tetapi juga berhubungan dengan peran sosial, moral, dan agama yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, model ekonomi Islam menekankan pentingnya pemerataan hasil produksi, tetapi dengan mempertimbangkan aspek-aspek moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis (Furqani, 2019).

Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak atas kekayaan yang diperoleh melalui upaya yang sah, namun pada saat yang sama, kekayaan tersebut juga memiliki dimensi sosial yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada akumulasi kekayaan, tetapi juga pada bagaimana mendistribusikan kekayaan tersebut secara adil. Dalam konteks ini, beberapa instrumen utama dalam ekonomi Islam yang mendukung keadilan distributif adalah zakat, waqf, dan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Alizadeh Emamzadeh, 2020).

Zakat sebagai Instrumen Keadilan Distributif

Zakat adalah salah satu instrumen paling terkenal dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai redistribusi kekayaan. Zakat, yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, mengalirkan sebagian kekayaan dari golongan kaya ke golongan miskin. Dalam konteks keadilan distributif, zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali sebagian kekayaan yang terkumpul pada individu yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, zakat berperan dalam mencapai tujuan sosial Islam, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah (Rahim, 2015).

Salah satu aspek penting dari zakat adalah bahwa ia tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang efektif untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi. Zakat, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup golongan miskin. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam implementasi zakat yang efektif, banyak negara Muslim telah mencoba untuk mengoptimalkan penerimaan zakat sebagai bagian dari upaya redistribusi kekayaan di masyarakat (Jatmiko, 2024).

Selain zakat, waqf merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang juga mendukung keadilan distributif. Waqf adalah sumbangan atau hibah yang disumbangkan oleh individu untuk kepentingan umum dan sosial, yang tidak dapat dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Biasanya, waqf digunakan untuk membiayai kegiatan sosial seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Dalam perspektif keadilan distributif, waqf berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa kekayaan yang ada dalam masyarakat digunakan untuk kesejahteraan sosial dan untuk memperkecil ketimpangan antara golongan kaya dan miskin (Furqani, 2019).

Sebagai contoh, waqf dapat dimanfaatkan untuk mendirikan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat kurang mampu, atau menyediakan layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Dengan cara ini, waqf membantu menciptakan peluang yang lebih adil bagi semua anggota masyarakat, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Oleh karena itu, waqf berperan penting dalam mendukung tujuan keadilan sosial dalam ekonomi Islam, yang mengedepankan kesejahteraan dan akses yang setara bagi seluruh anggota masyarakat (Alizadeh Emamzadeh, 2020).

Selain zakat dan waqf, sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah juga memainkan peran penting dalam ekonomi Islam untuk mendukung keadilan distributif. Kedua sistem ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam suatu usaha untuk berbagi keuntungan (dan kerugian) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya menyediakan tenaga kerja atau keahlian, dan keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Sedangkan dalam musyarakah, kedua pihak berkontribusi dengan modal dan keuntungan serta kerugian dibagi berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing (Rahim, 2015).

Sistem bagi hasil ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan individu, tetapi juga berusaha menciptakan distribusi yang lebih adil dari keuntungan yang diperoleh. Dengan cara ini, mudharabah dan musyarakah mengurangi ketimpangan yang terjadi dalam ekonomi kapitalistik, di mana sebagian besar keuntungan cenderung terkonsentrasi pada segelintir individu atau perusahaan besar. Dalam ekonomi Islam, pembagian keuntungan yang adil dan berdasarkan kontribusi ini memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh pihak yang terlibat (Furqani, 2019).

Implementasi Praktis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Modern

Penerapan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, meskipun telah terbukti efektif dalam teori, masih menghadapi tantangan besar dalam praktik. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem ekonomi global yang kapitalistik. Di banyak negara dengan populasi Muslim, penerapan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan waqf sudah dilaksanakan, tetapi masih terbatas pada skala yang kecil dan belum sepenuhnya optimal.

Zakat, misalnya, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, namun banyak negara Muslim belum memiliki sistem pengelolaan zakat yang efisien dan transparan. Hal ini menyebabkan potensi zakat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial belum dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara Muslim untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional, efisien, dan transparan agar tujuan redistribusi kekayaan dapat tercapai secara maksimal (Jatmiko, 2024).

Selain itu, waqf juga menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal pengelolaan dan distribusinya. Meskipun waqf dapat memberikan manfaat sosial yang besar, namun banyak waqf yang tidak dikelola dengan baik, sehingga potensi manfaatnya tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan pengelolaan waqf yang lebih

profesional dan berbasis pada prinsip keadilan sosial agar waqf dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi ekonomi Islam berbasis keadilan distributif adalah integrasi prinsip-prinsip Islam dengan sistem ekonomi global yang kapitalistik. Ekonomi kapitalistik cenderung berfokus pada akumulasi kekayaan individu dan kebebasan pasar, sementara ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penerapan sistem ekonomi Islam dalam dunia modern memerlukan perubahan struktural dalam kebijakan ekonomi dan keuangan.

Selain itu, kebijakan ekonomi kapitalistik yang berfokus pada pengurangan peran negara dalam perekonomian seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam mengedepankan peran negara dalam mengatur distribusi kekayaan, memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi pada segelintir individu atau perusahaan besar, dan menghindari praktik-praktik eksploitasi terhadap masyarakat miskin (Furqani, 2019). Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara dengan populasi Muslim untuk berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kebijakan publik mereka, agar tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Model ekonomi Islam berbasis keadilan distributif bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan memastikan pembagian kekayaan yang merata. Prinsip ini mengutamakan distribusi kekayaan berdasarkan kontribusi individu serta kepentingan sosial, menggunakan instrumen seperti zakat, waqf, dan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Zakat mengalirkan kekayaan dari golongan kaya ke miskin, sementara waqf mendanai fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan yang menguntungkan masyarakat luas. Namun, penerapan model ini dalam sistem ekonomi global yang kapitalistik menghadapi tantangan besar. Ekonomi kapitalistik lebih fokus pada keuntungan individu dan efisiensi pasar, yang seringkali mengabaikan aspek keadilan sosial. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam dengan kebijakan publik dan sistem keuangan modern. Keberhasilan penerapan ekonomi Islam berbasis keadilan distributif bergantung pada kolaborasi antara kebijakan pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Negara-negara dengan populasi Muslim perlu mengembangkan kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip ini, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alizadeh Emamzadeh, M. R. (2020). Analysis of economic convergence of Islamic justice in selected Islamic countries. *Journal of Economic Structures*, 9, 1-10. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00191-8>
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2, 8-14. <https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001>

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage publications.
- Furqani, H. (2019). Theory of distributive justice in Islamic perspective: A conceptual exploration. *Journal of Economics and Islamic Finance*, 5, 34-56.
- Hartono, J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jatmiko, D. H. (2024). Utilization of property distribution in the conception of Islamic economic justice. *Al-Hijrah: Journal of Islamic Economics And Banking*. <https://doi.org/10.55062/al-hijrah.v2i2.660>
- Mulyany, R., & Furqani, H. (2019). Sharing prosperity: Distributive justice framework in an Islamic moral economy. *Madania*, 23(2), 117-126.
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (2024). Keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam: Implikasi filosofis dan praktis. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 547-562.
- Rahim, S. (2015). A conceptual framework of distributive justice in Islamic economics. *Al-Albab*, 4(1), 19-38. <https://doi.org/10.24260/ALALBAB.V4I1.275>
- Syamsurijal Syamsurijal. (2024). Analisis Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.69768/ja.v2i1.25>